

Realisasi Kebijakan *Inward Looking* Presiden Jokowi Terhadap Kerjasama Energi Antara Indonesia-Turki

Realization of President Jokowi's Inward Looking Policy Towards Energy Cooperation between Indonesia and Türkiye

Febri Monalisa Panggabean^{a,1}, Stivani Ismawira Sinambela^{b,2}

^{a,b}Universitas Potensi Utama, JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia
Panggabeanfebri188@gmail.com¹, stivani@potensi-utama.ac.id²

ABSTRAK

Pada masa terpilihnya Jokowi, adanya prioritas menuju Indonesia yang berdaulat terdapat agenda nawacita pada poin ke tujuh mengenai penyediaan 35.000 MW listrik. Ada lima kapal yang ditempatkan di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Ambon dan Lombok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan inward looking presiden Jokowi terhadap Kerjasama antara Indonesia dan Turki pada bidang energi. Penulis menggunakan teori ketergantungan yang merupakan adanya hubungan antara negara maju dengan negara berkembang dalam Kerjasama yang dibangun, selain itu konsep yang digunakan oleh penulis yaitu konsep Kerjasama Bilateral karena banyaknya hubungan Kerjasama. Penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional dikarenakan pemenuhan listrik ini menjadi kepentingan negara Indonesia dan untuk pemenuhan nawacita Jokowi. Konsep kebijakan luar negeri (Perspektif Inward Looking) menjadi konsep terakhir, dalam konsep ini kebijakan luar negeri merupakan pendekatan yang memfokuskan pada isu domestik dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk kepustakaan.

Kata Kunci : Kebijakan Inward looking, Nawacita, Energi.

ABSTRACT

During Jokowi's election, there was a priority towards a sovereign Indonesia, namely the Nawacita agenda in point seven regarding the provision of 35,000 MW of electricity. There are five ships stationed in Indonesia, namely North Sulawesi, North Sumatra, East Nusa Tenggara, Ambon and Lombok. This research aims to find out what President Jokowi's inward looking policy is regarding cooperation between Indonesia and Türkiye in the energy sector. The author uses dependency theory, which is the existence of relationships between developed countries and developing countries in the cooperation that is being built. Apart from that, the concept used by the author is the concept of Bilateral Cooperation because of the many cooperative relationships. The author also uses the concept of national interest because fulfilling electricity is in the interests of the Indonesian state and to fulfill Jokowi's Nawacita. The concept of foreign policy (Inward Looking Perspective) is the final concept, in this concept foreign policy is an approach that focuses on domestic issues and is influenced by several domestic factors. The research method used by the author is by using qualitative research carried out by the author in the form of literature.

Keywords : Inward looking policy, Nawacita, Energy

Info Artikel :

Disubmit: 08 September 2024

Direview: 15 Oktober 2024

Diterima : 11 November 2024

Copyright © 2024 – senadimu. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang luas, dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan membutuhkan penggunaan energi yang meningkat juga. Proses penggunaan ini didorong juga karena adanya perkembangan ekonomi dan meningkatnya penggunaan teknologi. Kunsumsi listrik yang digunakan bahkan meningkat 6,7 persen rata-rata yang digunakan per tahun (Bosman and Dwi Putra 2024). (Bosman and Dwi Putra 2024)

Indonesia juga mempunyai kendala dalam menyebarluaskan listrik di berbagai daerah Indonesia. Adapun salah satu cara yang dimiliki oleh pemerintah yaitu dengan pendistribusian dengan menggunakan akomodasi kapal melalui jalur laut. Adapun solusi ini didapat dengan adanya program pada masa terpilihnya presiden Jokowi pada agenda atau nawacita presiden Jokowi yaitu mengenai kemandirian energi oleh Indonesia. Dengan dorongan visi misi pada masa terpilihnya presiden Jokowi mengenai prioritas jalan untuk perubahan Indonesia yang lebih berdaulat. Untuk memenuhi visi misi serta dorongan tersebut dibutuhkan adanya pembangunan atau pembuatan serta persiapan kapal. Jalur laut merupakan salah satu jalur yang cukup efisien. Dengan menggunakan kapal dapat mempermudah membagikan listrik di berbagai daerah. Untuk persiapan tersebut dibutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 bulan perancangan pembangunan energi listrik tersebut (Adistia et al. 2020).

Pada negara yang berdaulat sudah tentu memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini menjadi landasan setiap pengambilan keputusan oleh setiap kepala negara. Pada masa kepemimpinan presiden Jokowi dengan mewujudkan nawacitanya yaitu pada poin ke tujuh untuk mewujudkan kemandirian ekonomi termasuk juga pada bidang energi. Kerjasama Indonesia dan Turki dalam bidang energi ini di mulai dengan hubungan lama yang sudah terjalin sebelumnya (Setyowati 2023)

Indonesia dan Turki merupakan kedua negara yang sebelumnya sudah menjalin hubungan Kerjasama yang cukup banyak. Untuk itu dibuka Kembali kerjasama yang baru yaitu Kerjasama dalam bidang energi. Karadeniz Powership (Karpowership) merupakan nama kapal yang digunakan untuk penyaluran energi listrik ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan yang sudah dikatakan oleh presiden yaitu penyediaan 35000 MW listrik ke berbagai daerah untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan energi listrik di berbagai daerah Indonesia (Lubis and Zulian 2021).

Tabel 1.1 jumlah total kebutuhan listrik di 5 provinsi penempatan kapal MVVP

PROVINSI	DIBUTUHKAN	BANTUAN	SURPLUS
Sulawesi Utara	325 MW	120 MW	67 MW
Sumatera Utara	480 MW	240 MW	265 MW
NTT	75 MW	60 MW	32 MW
AMBON	58,4 MW	60 MW	63,16 MW
LOMBOK	260 MW	60 MW	40 MW

Beban pada bagian kelistrikan di Sulawesi Utara mencapai 325 MW dan kemudian menerima bantuan suplai listrik sebesar 120 MW sehingga mendapatkan hasil surplus sebanyak 67 MW pada provinsi Sulawesi utara. Pada Provinsi Sumatera Utara membutuhkan sebanyak 480 MW dan mendapat bantuan sebesar 240 MW sehingga pada provinsi ini mendapat surplus sebanyak 265 MW. Untuk Provinsi NTT membutuhkan tersedianya 75 MW listrik dan mendapat bantuan sebanyak 60 MW listrik, dikarenakan adanya sumber dari pembangkit listrik sebelumnya menjadikan Provinsi NTT surplus sebanyak 32 MW. Kebutuhan listrik Ambon yaitu sebanyak 58,4 MW dan mendapatkan bantuan listrik sebanyak 60 MW menjadikan Ambon surplus sebanyak 63,16 MW. Sedangkan Lombok membutuhkan sebanyak 260 MW listrik dan mendapat bantuan sebanyak 60 MW dikarenakan adanya sumber listrik dari pembangkit listrik membuat ambon memiliki surplus energi sebanyak 40 MW.

Mewujudkan kemandirian ekonomi merupakan agenda nawacita Jokowi pada poin ke 7 dan untuk mewujudkan agenda tersebut Jokowi melakukan hubungan kerja sama dengan Turki, agenda prioritas ini Jokowi melakukan kerja sama dengan Turki dalam pembangunan kapal pembangkit listrik karena beberapa alasan strategis dan ekonomi. Dengan adanya kapal pembangkit listrik, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian energi sehingga dapat mengurangi adanya ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang tidak dapat terbarukan. Kerja sama ini sejalan dengan visi Jokowi untuk meningkatkan infrastruktur energi di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi dari Turki, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan (Avivi and Siagian 2020)(Mohammad, 2017).

Krisis listrik yang dialami oleh warga di Sumatera dan Kalimantan setiap hari per hari nya bisa sampai 5 jam pemadaman listrik yang bergilir yang sering terjadi , ini merupakan salah satu keluhan dari provinsi Sumatera Utara. Dikarenakan adanya cadangan serta surplus pada ketersediaan energi listrik di Sumatera utara. Adapun pemadaman yang terjadi dikarenakan adanya gangguan teknis baik dalam kerusakan maupun pemeliharaan yang dilakukan oleh PLN. Marine Vessel Powerplant adalah alat dalam program nawacita presiden Jokowi dan dengan kapal ini diharapkan mampu menyalurkan dan menjembatani tersalurnya energi tersebut ke 5 Provinsi tersebut.

Inward looking merupakan sikap atau cara pandang dan sebuah proses yang melibatkan refleksi diri seperti memahami pikiran, perasaan, motif, dan perilaku internal seseorang. *Inward looking* juga merupakan tindakan yang menoleh kedalam diri untuk mengeksplorasi diri secara menyeluruh. *Inward looking* juga memiliki manfaat baik dalam meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kecerdasan emosional, meningkatkan kreatifitas dan meningkatkan kesehatan mental (Kastolani 2020). Latar belakang dari kebijakan *inward looking* pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai faktor. Pertama, kebijakan ini bisa dipandang sebagai bagian dari agenda "Indonesia Maju" yang mendukung optimisme dan keadilan di masa depan Indonesia, sebagaimana dibahas dalam debat presiden dimana Jokowi menyatakan visinya yang mengengdepankan kedaulatan, kemandirian yang berlandaskan gotong royong (Husain et al., 2020).

Jokowi telah menunjukkan minat dalam membangun sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap pengaruh asing. Misalnya, dalam konteks politik, Jokowi berusaha untuk menegaskan kepemimpinan yang menekankan pada kepentingan rakyat setelah pelantikannya sebagai presiden, meskipun menghadapi tantangan atau campur tangan pihak lain dari kekuatan kelompok-kelompok atau orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan atau memiliki pengaruh besar dan orang yang memiliki posisi elit dalam masyarakat serta memiliki pengaruh dan akses yang lebih besar daripada kebanyakan orang (Mietzner, 2019).

Rentang waktu yang dipilih oleh Penulis pada tulisan ini yaitu pada tahun 2015-2022. Melalui penelitian ini penulis akan membahas mengenai kebijakan *inward looking* presiden Jokowi terhadap Kerjasama energi antara Indonesia- Turki. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan penulis dapat memberikan wawasan serta penjelasan yang lebih luas kepada pembaca mengenai analisis kebijakan *inward looking* presiden Jokowi terhadap Kerjasama energi antara Indonesia Turki.

2. METODE

Penulisan penelitian ini ditulis menggunakan metode yang mendekati metode kualitatif dan dengan jenis penelitian yang bersifat yaitu penulis mengumpulkan data melalui jurnal dan artikel. Kemudian metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif dengan menampilkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atupun sedang berlangsung. penelitian ini juga merujuk pada analisis kebijakan *inward looking* Presiden Jokowi terhadap Kerjasama energi antara Indonesia Turki. Penelitian yang dilakukan penulis berbentuk kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan memahami penelitian atau sumber sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel dan berita. Dalam pemilihan sumber kepustakaan penulis mengambil rentan waktu 2015-2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nawacita Presiden Jokowi

Joko Widodo (Jokowi) adalah presiden Indonesia yang terpilih pada tahun 2014. pada masa terpilihnya Jokowi bersikap tegas pada salah satu kebijakannya yang cukup prioritas pada kebijakan luar negerinya. Prioritas tersebut adalah meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia demi terpenuhinya kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan dasar acuan dari prioritas

kebijakan yang dilakukan oleh setiap pemimpin. Untuk menjalankan prioritas tersebut selanjutnya akan dilanjutkan oleh Retno P. Marsudi selaku Menteri Luar Negeri dengan mewajibkan setiap misi diplomatik terjalankan karena adanya kepentingan nasional untuk menjalankan prioritas dari kebijakan presiden Jokowi (Saputro and Taufiequrrohmah 2021).

Gagasan Nawacita dari Presiden Jokowi lahir pada saat tingginya kekurangan kesiapan mental yang melanda bangsa Indonesia. Sehingga Jokowi mencanangkan adanya revolusi mental untuk melaksanakan agenda-agenda yang telah disediakan oleh presiden Jokowi. Karena adanya hal tersebut, Nawacita juga dijadikan oleh presiden Jokowi sebagai program utama dan tujuan yang utama bagi pemerintahan Jokowi dalam melakukan proses pemerintahan pada masa kepemimpinannya. Nawacita dan Revolusi Mental menjadi beriringan karena merupakan landasan awal dan penting dalam terlaksanannya masa pemerintahan presiden Jokowi. Sedangkan pada konsep Revolusi Mental cukup menekankan pada bagian melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu yang merupakan harapan dan cita-cita dalam menciptakan susunan negara serta masyarakat Indonesia menuju kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dan juga mengurangi kesusahan dan permasalahan yang ada sebelumnya di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial serta politik yang ada. Revolusi mental juga digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dalam merumuskan wawasan kebangsaan serta perubahan krisis mental yang mendorong terjadinya revolusi mental. (MOHAMMAD 2017)

Revolusi mental juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat pada wacana politik dalam terpilihnya presiden Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Sebutan tersebut dikenal oleh masyarakat bahkan pengamat politik serta bahasa, filsafat dan para akademisi lainnya. Bahkan munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan serta menjadi pendukung revolusi mental tepat setelah terpilihnya presiden Jokowi. Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI kemudian memunculkan lirik lagu yang disebut sebagai Mars dari Revolusi Mental. Tepat pada tahun 2016, Presiden Jokowi juga menandatangani adanya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 mengenai adanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dasar dari pemikiran Inpres ini dilakukan karena adanya konteks “memperbaiki serta membangun karakter bangsa Indonesia dengan melakukan dan mewujudkan Revolusi Mental yang mengarah kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong dalam membangun budaya bangsa yang baik seperti bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila”. Inpres ini berisi 5 program gerakan nasional revolusi mental yaitu Program Gerakan Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, adanya Program Gerakan Indonesia Tertib, serta Program Gerakan Indonesia Mandiri dan Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Pada awalnya terdapat revolusi mental hanya dikenal dengan sebutan sebagai jargon kampanye politik yang digunakan oleh presiden Jokowi maju dalam Pilihan presiden 2014. Setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI, istilah revolusi mental berganti menjadi suatu konsep dan salah satu kebijakan pada sistem pemerintahan. Revolusi Mental juga terlihat menjadi salah satu doktrin dalam Filsafat Politik Jokowi sebagai upaya membangun negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip utilitarianisme. Doktrin serta Filsafat Politik Jokowi juga dimasukkan kedalam agenda Nawacita yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan politik pemerintahan Jokowi-JK.

1. Kebijakan *Inward Looking* Presiden Jokowi Dengan Pemerintah Turki

Salah satu program yang telah dicanangkan oleh presiden Jokowi dalam program Nawacita jilid II adalah pembangunan listrik yang merata ke berbagai pelosok negeri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa membangun dari pinggiran dapat diartikan juga sebagai pembangunan dari sumber daya manusia yang selama ini terbilang terpinggirkan dan kurang mampu dalam ekonomi. Nawacita merupakan wujud nyata dari apa yang dikenal juga dengan *working* ideologi, karena itu Nawacita akan menjadi satu konsep manajemen pembangunan. pembangunan yang merata di setiap seluruh wilayah daerah-daerah terpinggirkan adalah bagian dari perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan pembangunan daerah yang sebelumnya hanya terpusat pada daerah Jawa, dalam program aksi Nawacita, pembangunan yang

dilakukan pada daerah-daerah pinggiran serta perbatasan sehingga pembangunan dapat dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia (MOHHAMAD 2017).

Kepentingan nasional merupakan faktor penentu pengambilan keputusan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. menurut Hans J.Morgenthau Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorial suatu negara, Kedua perlindungan terhadap identitas politik, dapat dilihat dari mempunyai suatu negara mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap kulturenya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya (Arega 2019).

Latar belakang dari kebijakan *inward looking* pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai faktor. Pertama, kebijakan ini bisa dipandang sebagai bagian dari agenda "Indonesia Maju" yang mendukung optimisme dan keadilan di masa depan Indonesia, sebagaimana dibahas dalam debat presiden dimana Jokowi menyatakan visinya yang mengengdepankan kedaulatan, kemandirian yang berlandaskan gotong royong (khdan Prasetya and Asep Setiawan 2023)

Kepemimpinan kebijakan Jokowi yang bersifat *inward looking* berbeda dari sifat kepemimpinan presiden Indonesia sebelumnya, dengan adanya latar belakang yang berbeda juga diyakini bahwa emosi dan kaarkter Jokowi dapat membatasi diri dari hal hal yang mengecohkan diri yang dapat mengganggu pengambilan keputusan Jokowi. kebijakan serta gaya memimpin Jokowi yang cukup berbeda dari gaya kepemimpinan presiden sebelumnya. kebijakan Jokowi lebih cenderung kearah *inward looking* dan ini akan mempengaruhi kinerja politik luar negeri Indonesia yang dikarenakan adanya kepentingan nasional Indonesia (Situmorang 2015)

Dalam program kebijakan *inward looking* presiden Jokowi dapat dilihat bahwa tujuan kebijakan *inward looking* ini dibuat sebagai wujud komitmen pemerataan dari pembangunan di seluruh Indonesia. Kebijakan dari komimen tersebut ini terlihat dari Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam memperbaiki daerah infrastruktur-infrastruktur dari daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Setelah terpilihnya Jokowi sebagi Presiden Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki janji dalam membangun Indonesia dimulai dari daerah pinggir hingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi tidak terpusat pada wilayah Pulau Jawa atau di wilayah bagian Barat Indonesia. Kebijakan ini juga mengembangkan adanya suatu pembangunan yang sebeumnya hanya bertumpu pada Pulau Jawa semata, kemudian sekarang setelah terjadi pemerataannya di luar-luar Jawa juga, khususnya di bagian Timur Indonesia juga.

2. Memperkuat Kerjasama Dengan Pemerintah Turki Melalui OKI dan G20

Dalam upaya pemerintah menangani adanya berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Islam, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah didirikan sebagai sebuah tanda dan bukti organisasi multilateral yang bertujuan untuk memperkenalkan kerjasama dan solidaritas di setisp 57 negara anggotanya yang bermayoritas penduduknya beragama Islam. Adanya kerja sama yang erat antar negara anggota, OKI adalah berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, organisasi ini juga merupakan organisasi yang merujuk kepada pasar halal yang dapat dirasakan obagi para wisatawan muslim dan hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap negara anggota. Kehadiran OKI ini dalam hal ini berperan sebagai wadah yang penting bagi setiap negara-negara anggota untuk membangun Kerjasama, berbagi setiap pengalaman, serta membangun dan memberikan solusi bersama dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara-negara Islam. Oleh karena itu, organisasi ini memberikankan wadah bagi para negara anggota dalam bentuk forum, yang mana setiap para pemimpin maupun perwakilan dari para negara anggota dapat saling berjumpa dan berdiskusi, serta merumuskan setiap kebijakan yang kemudian dapat meningkatkan dan memajukan kesejahteraan ekonomi bagi aetiap para negara anggota. Melalui

dialog dan kerja sama yang intensif, OKI juga dalam hal ini berusaha dalam meningkatkan kemajuan pada setiap bidang saling terkait seperti di bidang ekonomi secara khusus pada bagian sektor perdagangan dan investasi untuk setiap negara anggota (Suryanto and Kurniati 2020).

Indonesia dan Turki juga sepakat dalam memperkuat kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara kedua negara. Hal itu juga disepakati dan di setuju setelah Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki, Vedat Isikhan, di sela-sela Konferensi Perburuhan internasional, di Jenewa. Menteri Ida Fauziyah menyampaikan pendapat serta keinginannya atas kerja sama kedua negara yang telah terjalin di berbagai forum internasional yang diikuti Seperti G20 dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dalam pertemuan ini juga, Ida Fauziyah juga menekankan bahwa pentingnya implementasi yang dilakukan segera dari rencana aksi yang tercantum dalam perjanjian kerja sama yang sebelumnya disepakati di Baku. Perjanjian ini menjadi dasar untuk setiap inisiatif bersama yang akan datang. Penandatanganan yang dilakukan kembali perjanjian tahun kemarin menunjukkan komitmen dalam melakukan Kerjasama yang lebih kuat dalam menghadapi sektor Kerjasama ke tenaga kerja. Keikutsertaan Indonesia dengan adanya Kerjasama G20 yaitu menekankan isi climate change dan juga perjanjian paris untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan (Hulu 2023).

Pada forum Kerjasama G20 menghasilkan Penandatanganan 7 perjanjian kerja sama bilateral Indonesia-Turki, terdiri dari 5 perjanjian G to G dan 2 perjanjian B to B, telah berlangsung di Nusa Dua, Bali, 14 November 2022. Perjanjian G to G tersebut di bidang pertahanan, ristik-inovasi, lingkungan, kehutanan, dan kerja sama pembangunan; sedangkan 2 perjanjian B to B yaitu antara PT Hutama Karya dan ERG terkait pembangunan jalan tol Sumatera, dan antara PT Shacmindo Perkasa dan Karsan terkait produksi dan distribusi bus listrik. Penandatanganan kedua perjanjian B to B disaksikan oleh Menteri PUPR RI dan Menlu Turki. Para pejabat RI yang berpartisipasi pada acara penandatanganan tersebut yaitu Menhan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala BRIN, dan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik (IDP), sedangkan pejabat di pihak Turki yaitu Menlu, Menteri Pertahanan Nasional, Menteri Pertanian dan Kehutanan, dan Wakil Presiden TIKKA (Ariyanti 2023).

3. Kerjasama Energi Dengan Turki

Kehadiran kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan atau kapal pembangkit listrik di Indonesia tidak hanya menyelesaikan defisit listrik di Sumatera Utara namun 4 provinsi lainnya juga yaitu Sulawesi utara, NTT, Lombok dan Ambon. Dalam kondisi ini presiden Jokowi meminta bantuan terhadap Turki untuk pengadaan kapal pembangkit listrik (Marine Vessel Power Plant) di Indonesia yang akan dilakukan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta di Indonesia. Hubungan Kerjasama ini dimulai sejak kunjungan yang dilakukan oleh presiden Jokowi ke Turki yaitu pada tahun 2017 hingga 5 tahun berjalannya Kerjasama yaitu pada tahun 2022. Dengan penempatan Lima wilayah Indonesia, yaitu Sulawesi Utara sebesar 120 MW, Sumatera Bagian Utara sebesar 240 MW, Kupang sebesar 60 MW, Ambon sebesar 60 MW, dan Lombok sebesar 60 MW (Merdeka.com 2015).

Hubungan ini dimulai pada tahun 1957, semenjak dibukanya kantor perwakilan oleh negara Republik Turki yang berada di Indonesia pada tanggal 10 April 1957 hubungan antara Indonesia Turki semakin erat. Pada tahun 2010, presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Turki atas undangan dari presiden Turki hingga menjalin hubungan Kerjasama antara Indonesia dan Turki. Kemudian pada tahun 2015 presiden Turki melakukan kunjungan balasan serta membahas isu ekonomi, dan Kerjasama yang lainnya (Bahri, 2015).

Pada tahun 2017 presiden Jokowi melakukan kunjungan balasan ke Ankara dan membahas kerjasama di bidang energi listrik, yang merupakan salah satu agenda presiden Jokowi terhadap penyediaan listrik di Indonesia.

Fokus utama presiden Jokowi adalah menetapkan kebijakan *inward looking* hal ini tidak terlepas dari tujuan utama presiden Jokowi dalam membangun ekonomi hingga ke daerah pelosok. Maka terbentuklah nawacita jilid II, yang tujuannya sebagai landasan bagi realisasi dalam pembangunan nasional yang sudah dilakukan presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga sekarang terlihat mengalami kelambatan dalam terealisasinya. Pada awal gagasan ini mulai di sahkan dan menjadi salah satu dasar dari ideologi dalam politik pembangunan yang memunculkan adanya peubahan bagi daerah – daerah tertinggal dan pedalaman di Indonesia. Namun pada oerkembangannya terealisasinya nawwacita mendapatkan tantangan yang baik dalam aspek luar dan dalam. Secara menyeluruh rakyat menjadikan UUD 1945 menjadikan tugas kepada negara dalam menciptakan kebijakan,dan Tindakan pdalam pengurusan, pengaturan, serta pengelolaan dan pengawasan untuk menciptakankemakmuran bagi rakyat Indonesia seperti tertera dalam cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum (Hastangka 2014).

Kebutuhan penggunaan energi mendapat peningkatan yang cukup tinggi. Adanya perkembangan teknologi memancing peningkatan kebutuhan yang diperlukan terhadap energi. Dalaam kehidupan sehari-hari peningkatan kebutuhan energi sebesar 6,7% pertahun (2012-2016). Energi listrik ini merupakan permasalahan yang akan dihadapi oleh negara apabila pemenuhan nya kurang dan menjadi persoalan bagi negara. Dikarenakan hal tersebut erjasama ini dilakukan karena mengancam ketahanan nasional Indonesia dan menjadikan Kerjasama ini sebagai salah satu pembangunan nasional (Bosman and Dwi Putra 2024)

Indonesia dan Turki memiliki hubungan Kerjasama ekonomi dan politik yang cukup baik dan memunculkan Kerjasama yang lebih erat lagi seperti pada Kerjasama energi ini memunculkan Kerjasama yang baru pada bidang pertahanan yaitu Kerjasama dalam pembuatan tank antara Indonesia Turki. mempunyai hubungan kerjasama ekonomi dan politik yang sangat baik. Tetapi dengan begini hubungan kerjasama antara Indonesia- Turki khususnya dalam bidang ekonomi akan semakin erat. Kerjasama dalam bidang ekonomi khususnya untuk masalah kelistrikan. Penguatan kerjasama di bidang energi di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik di kawasan kepulauan Indonesia antara lain melalui penggunaan power ship atau kapal penyedia pasokan listrik (Kominfo, 2022).Adapun kebijakan yang dilakukan dalam bidang energi pada *inward looking* presiden Jokowi yaitu peluncuran nawacita dan program pembangkit listrik 35000MW ditandai dengan komitmen untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA) dan *Letter of Intent* (LoI) untuk EPC (*engineering, procurement, construction*) serta *Groundbreaking* beberapa pembangkit merupakan tanda dan bukti untuk kelanjutan Kerjasama ini.

B. Realisasi Kebijakan *Inward Looking* Presiden Jokowi Terhadap Kerjasama Dengan Turki

Agar terwujudnya nawacita presiden Jokowi maka dilakukan perencanaan untuk penyediaan pembangkit listrik sebesar 35000MW. Terealisasinya nawacita tersebut juga melibatkan Kerjasama dengan Turki agar tercapai hasil yang diinginkan. Peran turki adalah sebagai penyedia kapal untuk pemenuhan kebutuhan listrik di 5 provinsi Indonesia.

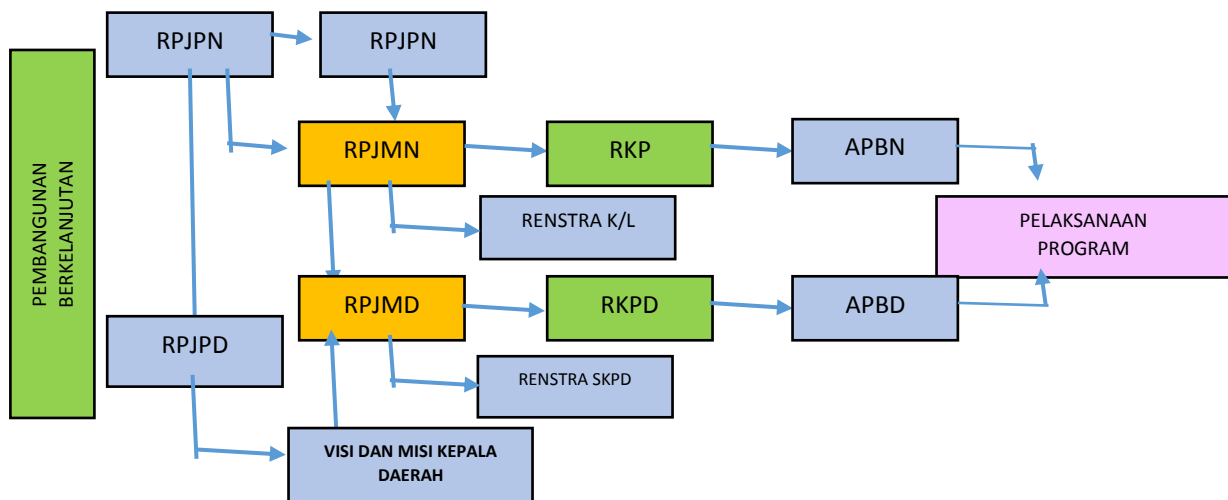
Dikarenakan hal tersebut presiden Jokowi membuat kebijakan yang dilandasi dengan adanya kepentingan nasional yang mengikuti kebijakannya. Presiden Jokowi dua nota kesepahaman (MoU). MoU itu yaitu BUMN perkapalan Indonesia PT PAL Bersama dengan Karadeniz Holding, yang merupakan salah satu perusahaan Turki yang bergerak pada bidang energi dan kapal pembangkit listrik senilai USD 320 juta dan penandatanganan kesepakatan PT Dirgantara Indonesia dengan *Turkish Aerospace Industry* senilai USD 200 juta. Kesepakatan dan Kerjasama ini dilakukan dengan melingkupi pembuatan empat powership (kapal listrik) dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 36-80 mw. Sedangkan , kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia d(Merdeka.com 2015)engan *Turkish Aerospace Industry* meliputi tiga hal utama. Kesepakatan itu di antaranya kerja sama di bidang *Marketing & Production Extension of N219, Joint Development and Production of N245*, serta UAV -

ANKA *Marketing & Production Extension*, terutama ekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Para pemimpin secara bersama menganut agenda secara universal dengan membangun kehidupan dunia yang berkelanjutan. Agenda tersebut kemudian disusun berdasarkan setiap pencapaian-pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yang dilakukan pada tahun 2000 dan melakukan pemantauan aksi-aksi pembangunan yang dilakukan selama 15 tahun terakhir. MDGs juga telah membuktikan bahwa tujuan global dapat mengangkat jutaan orang untuk keluar dari angka kemiskinan. Tujuan dan harapan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini bersifat global dan dapat diaplikasikan secara universal, dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. SDGs telah menerima dukungan dari seluruh dunia dari masyarakat sipil, bisnis, anggota parlemen dan pihak-pihak yang terkait. Keputusan untuk meluncurkan sebuah proses guna mengembangkan seperangkat SDGs dibuat oleh Negara-Negara Anggota PBB pada Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan, yang dilakukan di Rio de Janeiro pada Juni 2012 (Bakti and Sjafei 2020).

Dalam penentuan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 juga merupakan dokumen perencanaan yang akan dilakukan dalam jangka 5 tahun yang menjadi panduan bagi setiap Kementerian atau Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD. RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya (BAPPENAS, 2017).

Berikut gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah dapat dilihat dalam gambar 3.1



Gambar 3.1 Integrasi pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (BAPPENAS, 2017)

<https://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/18988/7.BAB%20III.pdf>

Gambar diatas merupakan gambar dari integrasi pembangunan berkeleanjutan yang terintegrasi dengan adanya rencana pembangunan yang dimulai dari kota dan desa. Rencana pembangunan jangka Panjang tersebut dapat diartikan dengan kepala negara dan juga kepala daerah yang membawa visi misi bersamanya.

Lalu pengartian visi dan misi setiap kepala negara dan setiap kepala daerah kemudian disusun dan dibentuklah suatu rencana pembangunan nasional maupun daerah. Dari adanya hasil RPJM/RPJMD maka disusunlah suatu renstra kementerian dan lembagarenstra SKPD dan menjadi Rencana Kerja tahunan Pemerintah (RKP) atau disebut juga dengan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk sumber pendanaan setiap pengaplikasian program ini berasal dari dana Apbn dan APBD. Dengan susunan Integrasi tersebut maka pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan pada tingkat pusat ataupun daerah.

1. Kapal Turki Di Sulawesi Utara

Kehadiran Kapal Pembangkit Listrik atau dikenal dengan kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) dan membawa sebanyak 120 MW berlokasi berdekatan dengan PLTU Amurang. Kapal ini diperkirakan akan sampai pada pukul 09.00 WITA. Tetapi pada saat perjalanan ke Sulawesi Utara terdapat kendala terhadap cuaca yang menimbulkan tingginya gelombang pada perairan Sulawesi Utara. Kendala tersebut juga menghambat dalam perjalanan menuju Sulawesi Utara. Pelepasan kapal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan membantu penyediaan listrik di Sulawesi Utara selama 5 tahun kedepan sejak keberadaan kapal tersebut. Dan tentunya kapal ini masih juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu agar pembangkit listrik ini dapat beroperasi dengan baik (Kementerian Sumber Daya Mineral, 2015).

Pembangkit listrik ini juga dapat dipindahkan ke daerah lain apabila diperlukan. Dengan keberadaan pembangkit listrik ini menjadikan PLN memiliki cadangan listrik karena sebelumnya sering mengalami masa overhaul dikarenakan puncak daya dari penggunaan listrik di Sulawesi utara mencapai 325 MW dan yang tersedia sebanyak 275 MW maka adanya kapal ini membantu menutupi kekurangan pasokan listrik yang ada di Sulawesi Utara. Nilai kontrak dari kehadiran kapal ini adalah Rp. 1.800 per kWh yang sudah termasuk biaya bahan bakar. Kemudian apabila PLN memakai listrik dari kapal ini, PLN cukup membayar seberapa banyak energi listrik yang digunakan (PLN (PERSERO), 2016).

Setelah melakukan percobaan dan uji pada mesin kapal, PLN juga membangun tower transmisi 150 kV yang dapat menghubungkan MVPP dengan Switchard dan kemudian disambungkan ke suplai pada gardu induk Amurang. Keberadaan pembangkit ini dianggap sebagai solusi sementara defisit listrik di Sulutenggo. Wilayah Sulutenggo mengalami krisis listrik selama bertahun-tahun dan belum ada solusi untuk menanganinya. Selanjutnya, PLN akan mendatangkan power plant serupa untuk beberapa lokasi antara lain Sumatera Bagian Utara (240 MW), Kupang (60 MW), Ambon (60 MW), dan Lombok (60 MW).

2. Kapal Turki Di Sumatera Utara

Kehadiran kapal t MVPP kebudian di provinsi Sumatera Utara tepatnya di Belawan. Kehadiran kapal ini juga membantu sistem kelistrikan di Sumatera Utara. Kehadiran kapal ini juga diharapkan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy bukan hanya menyelesaikan permasalahan defisit listrik, namun gubernur berharap agar kehadiran kapal ini dapat melakukan transfer pengetahuan tentang kapal MVPP ini. Kapal ini membawa dan menciptakan lapangan pekerjaan karena pada proses pengoperasian kapal ini dibutuhkan 150 pekerja 10 diantaranya adalah yang berasal dari Turki dan sisanya berasal dari Indonesia. Diharapkan proses Kerjasama ini akan semakin baik lagi kedepannya (SUMUT, 2021).

Menurut General Manager PLN yang ada di Sumatera Utara kapal ini merupakan kapal terbesar yang pernah bersandar di Belawan yang memiliki panjang 300 meter dan lebarnya 50

meter dengan dilengkapi mesin PLTD berkapasitas 18,81MW/unit, dengan jumlah sebanyak 24 unit (Tribun Medan, 2017).

3. Kapal Turki Di Lombok

General Manager PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Karyawan Aji, memastikan kapal pembangkit listrik “Gokhan Bey” dari Turki akan tiba di Lombok awal Februari 2017 mendatang. Kemungkinan besar Februari 2017 Karpowership atau kapal pemangkit listrik dari Turki sudah tiba di Lombok dan Maret sudah mulai operasional. Karpowership adalah kapal apung pembangkit listrik sewa antara PLN dan keluarga Karadeniz, sebagai bagian dari program 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, hingga 2019 mendatang. Kapal listrik dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan tersebut akan diberangkatkan dari galangannya, di Hat-San, pesisir Laut Marmara di Yalova, Istanbul, Turki. Kapal yang akan menghasilkan energi listrik sebesar 60 MW itu nantinya akan ditempatkan di perairan kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kabupaten Lombok Barat. Saat ini infrastruktur pendukung yang dibutuhkan sebagai tempat menyandar Karpowership selama masa sewa sudah mulai disiapkan oleh pihak PLN. (Radar Lombok, 2016).

4. Kapal Turki Di Ambon

Kehadiran kapal pembangkit listrik di Ambon pada tanggal 31 oktober 2017. kapal yang tiba di Ambon memiliki panjang 120 meter dan lebar 22 meter . kapal ini membawa 60 MW pasokan listrik dari turki dsn digunakan selama 5 tahun dibawah naungan PLN. Kehadiran kapalu Ambon . kehadiran ini membantu pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat khususnya di pulau ambon. Kapal ini juga memperhatikan masalah limbah yang tidak mencemari lingkungan perairan kapal ini (Patty, 2017). hal ini merupakan salah satu solusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Ambon dan diharapkan agar pasokan listrik dari MVPP ini membaw dampak positif bagi masyarakat. Persiaan dala penggunaan kapal ini membutuhkan kurang lebih 1 atau 2 minggu pesiapan agar kapal ini beroperasi dengan baik dan pembangunan PLTP Tulehu yang memiliki kapasitas 2 x 10 MW dan PLTMG Ambon Peaker yang berkapasitas 30 mW yang menjadi prioritas bagi sitem listrik di Ambon (Yonavilbia, 2017).

5. Kapal Turki di NTT

Kemudian kehadiran kapal MVPP dari Turki berlabuh di Sulawesi selatan . daerah ini merupakan daerah yang mengalami kekurangan pasokan energi karena adanya kegiatan industry perusahaan dan kegiatan ini membutuhkan pasokan energi . ditambah juga dengan penggunaan listrik untuk keperluan rumah tangga. Pemadaman akibat kurangnya pasokan energi bisa sampai berjam-jam . dan kapal ini membaa sebanyak 60 MW pasokan listrik yang akan digunakan di NTT. Dan pasokan yang dibutuhkan sebanyak 75MW . dengan hadirnya kapal ini membantu memenuhi kebutuhan listrik di NTT.

C. Faktor-Faktor Keberhasilan Kebijakan *Inward Looking* Presiden Jokowi Mengenai Nawacita Jilid II

Adapun Sembilan prioritas menuju indoneesia maju pada nawacita presiden Jokowi dan juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN pada tahun 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini merupakan tiang penegak bagi proses pembangunan yang kuat di masa yang akan datang. Tersedianya nawacita ini bukannya sebagai omongan belaka namun sebagai penunjuk arah pembangunan kedepannya. Adapun pendukung yang penting dalam keberlanjutan nawacita ini yaitu:

- Adanya substansi hukum atau badan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan hukum tersebut yang meliputi adanya reforfasi pada legislative.
- Terstrukturnya hukum baik pada para petugas penegakan hukum pada sumber daya manusi yang di sertakan oleh aparat penegak hukum.

- Terdapat budaya hukum yang meliputi aparat penegak hukum hingga masyarakat pada umumnya. (Dr.H Sugianto, SH, MH 2019).

Keberhasilan kebijakan *inward looking* Presiden Jokowi juga didorong dengan melakukan pembangunan yang dimulai dari pelosok desa. Janji Presiden Jokowi terhadap pembangunan terhadap desa. Nawacita tersebut akan dimulai dengan pembangunan yang tidak terfokus pada daerah Jawa saja namun pada daerah yang pinggiran dan tertinggal juga (Jurnal Fitri Halimah 2019). Pembangunan dari daerah pinggiran juga mendapat fokus bagi pemerintah dikarenakan pemenuhan Nawacita yang merata dan masyarakat tidak hanya menerima janji pada saat kampanye saja.

Kemudian adanya perlindungan sosial dengan memberikan anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu pada ekominya. Seperti pada penyebaran bantuan tunai bersyarat kepada 6 juta keluarga, kepada penerima bantuan jaminan Kesehatan nasional sebanyak 92,4 juta jiwa dan penyesuaian besaran premi penerima bantuan serta terjalankannya program sejuta rumah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Beberapa program tersebut merupakan program yang akan dilanjutkan dibawah kementerian dan Lembaga terkait agar lebih efektif. Namun program yang dilanjutkan dilakukan oleh menteri terkait tetap mendapatkan evaluasi dan monitoring baik di pusat daerah maupun di desa (Rahman, 2018).

D. Kelemahan Dari Kebijakan *Inward Looking* Presiden Jokowi Pada Program Nawacita Jilid II

Dalam sebuah pelaksanaan program kerja dan gagasan yang akan dilakukan dapat juga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dengan mewujudkan proses pelaksanaan Nawacita yang dicanangkan oleh presiden Jokowi. Salah satu hal yang ditandai dengan arah kebijakan yang dilakukan, kurangnya pemahaman serta informasi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan masyarakat lebih cenderung menganggap bahwa proses dari kinerja presiden Jokowi kurang baik dan pada Kerjasama energi ini membawa dampak bagi masyarakat sekitar kapal tersebut. Seperti halnya kapal yang berada di Sulawesi utara yang belum memiliki dokumen analisis dampak Lingkungan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. (JUDITH, 2019)

Dengan adanya perkembangan pembangunan infrastruktur adalah yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan sarana dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur secara fisik dapat menghasilkan hasil yang lebih cepat dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk setiap daerah provinsi juga mendapat hasil yang baik bagi segala kegiatan yang berlangsung. Namun, setiap pembangunan dan pengembangan yang dilakukan juga dapat menimbulkan munculnya masalah baru, tanpa adanya rumusan kebijakan yang berwawasan mengenai lingkungan maka pembangunan yang sedang dilakukan akan mempengaruhi dampak buruk pada kualitas lingkungan hidup. Seperti adanya pertumbuhan ekonomi yang melalui sektor industri yang asri menjadi Kawasan yang terkena dampak seperti pencemaran air, pencemaran udara, tanah maupun membawa limbah-limbah yang berbahaya dan memiliki kandungan racun yang dapat merusak suatu ekosistem yang ada pada lingkungan pembangunan infrastruktur tersebut. Dampak yang kemudian yaitu adanya kerusakan lingkungan yang terjadi tersebut menyebabkan banjir, tanah longsor dan punahnya satwa-satwa liar dan juga langka.

Oleh karena hal tersebut pembangunan yang dilakukan pada infrastruktur harus juga disertai pada pemahaman terhadap keamanan lingkungan disekitar pembangunan tersebut. Pada Kerjasama yang dilakukan penyediaan 5 kapal di provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Lombok, dan juga Ambon yang berbeda beda juga khususnya bertepatan di Kawasan laut yang dapat mencemari dan membawa dampak pada kerusakan lingkungan pada pantai dan perairan di sekitar tempat proses pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam pengadaan energi di 5 provinsi tersebut.

4. KESIMPULAN

Inward looking merupakan sikap atau cara pandang dan sebuah proses yang melibatkan refleksi diri seperti memahami pikiran, perasaan, motif, dan perilaku internal seseorang. Pengambilan keputusan ini didorong oleh adanya kepentingan nasional. Jokowi merupakan presiden Indonesia dengan , pada masa pencalonannya ia membuat janji untuk kemakmuran Indonesia, nawacita dihadirkan sebagai perwujudan dari janji pada masa pencalonannya. Pada poin ke tujuh nawacita yaitu membangun kemandirian ekonomi dan termasuk juga di dalamnya bidang energi karena sebelumnya sering terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan. Nawacita didukung oleh adanya pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rangkaian program kerja yang akan terlaksanakan kedepannya. Penempatan kapal Marine Vessel Power plant ditempatkan di lima Provinsi yang ada di Indonesia yaitu Sulawesi Utara sebanyak 240 MW, Sumatera Utara sebanyak 120 MW, Nusa Tenggara Timur sebanyak 60 MW, Ambon sebanyak 60 MW dan Lombok sebanyak 60 MW. Penyediaan kapal ini di tandatangani pada saat kunjungan balasan presiden Jokowi di Ankara. Realisasi proses kelistrikan dipandu dan diawasi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dibawah naungan BUMN. Adapun kelebihan dari Kerjasama ini adalah membuka jalan bagi hubungan Kerjasama yang lainnya pula dan untuk kekurangan dari realisasi kebijakan *inward looking* presiden Jokowi yaitu kurangnya pemberitahuan pemerintah mengenai kinerja yang sedang dijalankan karena kurangnya pemahaman masyarakat yang menimbulkan pemikiran masyarakat bahwa presiden Jokowi melakukan kinerjanya dengan tidak baik. Tulisan ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana realisasi dari kebijakan *inward looking* presiden Jokowi dan pada tulisan ini juga terdapat kekurangan pada sumber yang tersedia yang terkait dengan tulisan ini dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan sumber data yang berkaitan dengan Kerjasama energi dan kebijakan *inward looking* presiden Jokowi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Universitas Potensi Utama untuk setiap dukungan dan dorongan yang diberikan kepada penulis untuk menulis dan melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

REFERENSI

- [1] Adistia, Nurul Amandha, Rizky Aditya Nurdiansyah, Juno Fariko, Vincent Vincent, and Joni Welman Simatupang. 2020. "Potensi Energi Panas Bumi, Angin, Dan Biomassa Menjadi Energi Listrik Di Indonesia." *TESLA: Jurnal Teknik Elektro* 22 (2): 105. <https://doi.org/10.24912/tesla.v22i2.9107>.
- [2] Ariyanti, Ni Ketut Alit. 2023. "Dampak Presidensi G20 Sebagai Forum International Dalam Kebijakan Perekonomian Masyarakat Bali." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6 (1): 141–46. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.811>.
- [3] Avivi, Yusron, and Muhnizar Siagian. 2020. "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3 (1): 49–61. <https://doi.org/10.23969/paradigmopolistaat.v3i1.2967>.
- [4] Bakti, Bakti, and M. Saleh Sjafei. 2020. "Paradigma Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 4 (2): 173–84. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17634>.
- [5] Bosman, Ofan, and Reza Dwi Putra. 2024. "Arah Pembangunan Energi Terbarukan Di Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo." *Energy Justice* 1 (1): 51–64.
- [6] Hastangka. 2014. "Doktrin Filsafat Politik Jokowi Dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental) 1 Oleh Abstrak Pendahuluan Istilah Revolusi Mental Mulai Dikenal Dalam Wacana Politik Di Indonesia Ketika Jokowi Maju Dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun." *Jurnal Pancasila* 1 (No.2 Tahun 2020): 39–44.

-
- [7] Hulu, Hizkia Bryan. 2023. "Analisis Efektivitas Paris Agreement Terhadap Indonesia Sebagai Anggota G20 Dalam Menangani Climate Change." *Nucl. Phys.* 13 (1): 104–16.
- [8] khdan Prasetya, and Asep Setiawan. 2023. "Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Dalam Pengembangan Tank Tahun 2019-2022." *Socia Logica* 3 (2).
- [9] Lubis, A S, and I Zulian. 2021. "Kerjasama Indonesia-Turki Dibidang Energi Era Pemerintahan Jokowi Tahun 2015-2020." *Jurnal FISK* 2 (1): 94–100.
- [10] Merdeka.com. 2015. "No Title," no. Jokowi minta Turki bangun kapal pembangkit listrik di Indonesia. https://www.google.com/search?q=jokowi+meminta+kerjasama+terkait+marine+energy++dari+turki&client=firefox-b-d&sca_esv=b99a51cc48654f1f&sca_upv=1&ei=Z5VCZr2hGrriseMPuPGTsAo&ved=0ahUKEwj98OXh14uGAxU6cWwGHbj4BKYQ4dUDCA8&uact=5&oq=jokowi+meminta+kerjasama+ter.
- [11] MOHHAMAD, SOLEMAN MOCHDAR & NOER. 2017. "NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015." *KAJIAN POLITIK DAN MASALAH PEMBANGUNAN* VOL. 13 No (POLITIK).
- [12] Saputro, Adi, and Taufiequrrohman Taufiequrrohman. 2021. "Investasi Dalam Bingkai Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi Jilid Satu Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia." *Perspektif* 10 (2): 450–66. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4612>.
- [13] Setyowati, Ari. 2023. "Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2 (4): 779–84. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4812>.
- [14] Situmorang, Mangadar. 2015. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- [15] Suryanto, and Poni Sukaesih Kurniati. 2020. "Tourism Development Strategy In Indonesia." *Academy of Strategic Management Journal* 19 (6): 1–8.